

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Roymarthin Nitti¹, Minarni A. Dethan², Maria I. H. Tiwu³
^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia
Email: nroymarthiin@gmail.com

Article History

Received: 06-06-2025

Revision: 11-06-2025

Accepted: 13-06-2025

Published: 27-06-2025

Abstract. This research aims to determine and evaluate the extent of the implementation of the accrual-based accounting system at the East Nusa Tenggara Regional Police in 2022/2023. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the accrual-based accounting system at the East Nusa Tenggara Regional Police in 2022/2023. This research is located at the NTT Regional Police Operations Bureau Office with a qualitative research type. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection method in this study uses observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that reporting at the NTT Regional Police Operations Bureau office is in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. This is supported by real evidence that the NTT Regional Police Operations Bureau office has been enthusiastic about implementing and optimizing the accrual-based accounting system in improving the quality of reporting by utilizing the use of the SAKTI Application in the financial reporting process.

Keywords: Accrual Basis, Implementation, Accounting System, SAKTI Application

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2022/2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2022/2023. Penelitian ini berlokasi di Kantor Biro Operasi Polda NTT dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan di kantor Biro Operasi Polda NTT sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa kantor Biro Operasi Polda NTT telah antusias mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan dengan memanfaatkan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam proses pelaporan keuangan.

Kata kunci: Basis Akrual, Implementasi, Sistem Akuntansi, Aplikasi SAKTI

How to Cite: Nitti R., Dethan M. A., & Tiwu M. I. H. (2025). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (2), 5508-5523. [10.54373/ifjeb.v5i2.3351](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i2.3351)

PENDAHULUAN

Dinamika modernisasi terus bertransformasi dan berkembang khususnya dalam hal sistem manajemen atau tata laksana pemerintahan. Regulasi ini berisi seluruh mekanisme yang

berhubungan dengan segala sesuatu yang memiliki harta kekayaan yang bersumber dari penerimaan negara. Guna meningkatkan upaya mendukung terlaksananya akuntabilitas keuangan maka Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Keuangan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan konsep *Integrated Financial Management Information System*.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinovasi membuat wadah aplikasi dengan menyederhanakan sistem yang jumlahnya sangat banyak pada tiap satuan kerja menjadi satu aplikasi dalam satu basis data yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam Permenkeu No. PMK- 159/PMK.05/2018 Pasal 1 diartikan sebagai aplikasi guna mendukung sistem anggaran serta perbendaharaan di instansi Pemerintah. Sistem ini didukung dengan fitur utama antara lain: digunakan oleh seluruh satker Kementerian atau Lembaga, disertai dengan pengamanan data serta desain konsep sistem yang sederhana. Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang memiliki integritas tinggi diperuntukkan untuk seluruh satuan kerja (SatKer) instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem ini dapat mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara.

SAKTI dikeluarkan karena pemerintah berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja (Amriana & Iskandar, 2019). Pengembangan ide SAKTI dibangun melalui penyederhanaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebelumnya.

Aplikasi SAKTI mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi eksisting yang digunakan saat ini, seperti Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAKTI, program SAKTI mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan uji coba 12 Satker di Kemenkeu dan Satker SPAN (Mukhtaromin, 2018)

Perlu diperhatikan juga terkait penelitian yang dikembangkan oleh Novelia (2023) yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem khususnya *response time* dan kemudahan penggunaan (*easeofuse*) untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna. Implementasi SAKTI banyak memunculkan tantangan dan permasalahan. Diperlukan upaya sistematis seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga agar

sistem ini dapat diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI pada tahap uji coba awal. Nasrudin & Widagdom (2020) menyatakan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fitur aplikasi yang rumit, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya. SAKTI terdiri dari beberapa modul yaitu: modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul pelaporan, modul administrator.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapatkan kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 (Alatas, 2023). Berkaitan dengan hal tersebut Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggunakan SAKTI untuk membuat laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan lain-lain serta mendukung kegiatan sistem pengelolaan transaksi akuntansi dan pelaporan yang dapat dikerjakan secara lebih transparan dan profesional, hasil pengolahan data dari aplikasi SAKTI kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan dan juga penentuan kebijakan selanjutnya.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan di bidang keuangan pada Kepolisian. Penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu bahwa peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan tentang Analisis Implementasi Berbasis Akruwal Pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer pada penelitian ini menggambarkan mengenai Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Analisis implementasi Berbasis Akruwal Pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Yang akan diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dan data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan data laporan keuangan Kantor Biro Operasi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, serta data-data lain

berupa angka yang akan dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Urusan Keuangan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Operator Komitmen dan Pelaporan, Operator Perencanaan dan Penganggaran dan Operator Aset dan Persediaan. Teknik pengambilan informan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data menurut Miles & Huberman (1984). Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing* atau *verification* (Sugiyono, 2013)

HASIL

Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal di Biro Operasi Polda NTT

Implementasi Akuntansi Berbasis Akruwal pertama kali di Biro Operasi Polda NTT dimulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akruwal sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruwal. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruwal pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan Polda NTT yang menyatakan:

“Kami mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akruwal ditahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, kami juga bagian dari Satker sehingga sudah seharusnya menggunakan sistem berbasis akruwal karena pelaporan terpusat. Saya rasa penerapan pencatatan akuntansi berbasis akruwal juga memberikan gambaran lebih detail dan akurat mengenai pencatatan mulai dari penganggaran sampai pelaporan”

Hal tersebut sama halnya dengan yang disampaikan oleh bagian Operator Komitmen dan Pelaporan Operasi Polda NTT yang menjelaskan:

“Kami di Kantor Biro Operasi Polda NTT sudah menerapkan sistem berbasis akruwal yang sebelumnya menggunakan basis kas menuju akruwal dan laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”.

Disampaikan juga oleh Operator Aset dan Persediaan yang menjelaskan bahwa:

“Mau tidak mau tetap kami terapkan sistem akuntansi berbasis akrual karena sudah menjadi aturan bahwa laporan keuangan harus berbasis akrual sejak 2015. Keuntungan merapakan basis akrual utamanya pada LO dan Neraca disitu sangat diperhatikan sehingga aset-aset dan pengelolaan keuangan di masing-masing satker betul-betul bisa tergambar terkhususnya pada neraca untuk aset dan kewaibannya termasuk kemampuan satker yaitu euitasnya terliat disana. Adapun LPE hanya untuk mengetahui alurnya dari mana kemana sehingga diperoleh hasil sekian.”

Hasil wawancara menggambarkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Biro Operasi Polda NTT memberikan keuntungan signifikan dengan mampu menggambarkan pencatatan keuangan secara lebih akurat dan terperinci mulai dari tahap penganggaran hingga pelaporan. Sistem berbasis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk mengidentifikasi posisi keuangan Biro, perubahan aset, pendapatan, modal, serta bagaimana pendanaan kegiatan sesuai kapasitas keuangan entitas secara jelas dan transparan. Meski demikian, penerapan akuntansi akrual menghadirkan tantangan terutama bagi aparatur yang harus memahami dan beradaptasi dengan sistem yang relatif lebih kompleks dibanding akuntansi berbasis kas atau kas menuju akrual. Adaptasi ini menjadi tugas penting dan harus dilakukan secara terstruktur agar pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat optimal.

Dalam hal pelaporan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kantor Biro Operasi Polda NTT menyajikan komponen laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara anggaran disusun berdasarkan basis kas — di mana pendapatan dan pengeluaran diakui saat kas diterima atau dibayarkan — penyusunan LRA dan Neraca mengacu pada basis akrual. Artinya, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas berpindah tangan. Hal ini memperkuat kualitas laporan keuangan yang lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Proses pencatatan dan pelaporan di Biro Operasi Polda NTT saat ini didukung oleh aplikasi SAKTI, yaitu aplikasi keuangan terpusat untuk pengelolaan keuangan satuan kerja yang mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Aplikasi ini memfasilitasi pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran secara efisien. Selain itu, pegawai keuangan di Biro Operasi Polda NTT telah mengikuti berbagai pelatihan khusus penggunaan aplikasi SAKTI, yang diadakan baik oleh Polda NTT maupun Kementerian Keuangan secara offline dan online. Pelatihan ini penting untuk memastikan sumber daya manusia siap mengoperasikan sistem akuntansi berbasis akrual secara optimal dan mendukung tercapainya transparansi serta akuntabilitas keuangan instansi.

Sesuai dengan wawancara bersama Bapak Urusan Keuangan Polda NTT yang menjelaskan:

“Pertama kali Aplikasi SAKTI ini diterapkan di Biro Operasi Polda NTT sejak tahun 2021, sehingga semua karyawan diikut sertakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Puskeu Mabes Polri dan juga ada yang diselenggarakan oleh Kementerian keuangan baik secara online ataupun offline, pelatihan ini juga diadakan sesuai kebutuhan Sakter masing-masing instansi dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini semua pegawai bagian keuangan dapat menggunakan aplikasi SAKTI dengan baik dan benar”

Diterapkannya akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAKTI pegawai bagian keuangan merasa sangat terbantu dengan perubahan basis akuntansi tersebut, karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAKTI artinya memudahkan pegawai untuk membuat/menyusun laporan keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa, akan nampak secara mendetail.

Sesuai dengan wawancara bersama Kepala Urusan Keuangan Polda NTT yang menjelaskan:

“Penggunaan aplikasi SAKTI sangat membantu kami dalam proses pembuatan laporan seperti LRA, Neraca, LPE dan lainna di Biro Operasi Polda NTT karena sistemnya sudah terkomputeriasi, sehingga semua pencatatan tidak lagi kami lakukan secara manual tapi bisa secara online dan data laporan yang kami butuhkan sudah langsung tersedia dan bisa diakses kapanpun melalui HP/PC”

Sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Oprator Komitmen dan Pelaporan yaitu:

“Manfaat dari aplikasi SAKTI sangat terasa buat kami karena pencatatan dan pelaporan keuangan yang tersedia dan minim dari tingkat kesalahan sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan detail, dan juga jika ada kesalahan pencatatan bisa kami temukan dengan cepat karena sudah terincikan dengan baik segala transaksi yang terjadi”

Pada intinya sistem pelaporan keuangan dengan basis akrual pada Biro Operasi Polda NTT berjalan dengan baik dan lancar karena bantuan Aplikasi SAKTI yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan informasi dari Operator Aset dan Persediaan yang menyatakan bahwa:

“Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Biro Operasi Polda NTT, sudah berjalan dengan baik dan lancar sampai saat ini. Bisa dilihat di Kantor Biro Operasi Polda NTT menerapkan basis akrual yaitu dengan di digunakanna aplikasi SAKTI untuk pelaporan keuangan karena Aplikasi SAKTI sudah mendukung pelaporan berbasis akrual”

Sesuai juga dengan yang dijelaskan oleh Operator Komitmen dan Pelaporan yaitu:

“Penerapan sistem akuntansi akrual di Biro Operasi Polda NTT sudah diterapkan sejak tahun 2015, lalu ditahun 2021 dibantu dengan menggunakan aplikasi SAKTI, sehingga sejauh ini pencatatan akuntansi berbasis akrual di Operasi Polda NTT sudah berjalan dengan cukup baik”

Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan di Kantor Biro Operasi Polda NTT

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA/Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh bahwa Kantor Biro Operasi Polda NTT yang menyajikan alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kepolisian Negara yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	2023			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A. PENDAPATAN	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0,00	5.943.934,00	0	0,00	7.421.298,00	0
Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00		0,00	0,00	
Pendapatan dari Kekayaan							
Negara Dipisahkan		0,00	0,00		0,00	0,00	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0,00	5.943.934,00		0,00	0,00	
Jumlah Pendapatan		0,00	5.943.934,00	0	0,00	7.421.298,00	0
B. BELANJA	B.2						
Belanja Negara	B.2.1	6.630.504.000,00	6.630.488.752,00	100	6.640.331.000,00	6.639.013.722,00	100
Belanja Pegawai	B.2.2	12.935.625.000,00	12.515.491.000,00	97	8.294.974.000,00	8.294.974.000,00	100
Belanja Barang	B.2.3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Belanja Modal							
Jumlah Belanja		19.566.129.000,00	19.145.979.752,00	97,85%	14.935.305.000,00	14.933.987.722,00	100%

Sumber: Laporan Keuangan Biro Operasi Polda NTT, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp5.943.934,00 atau mencapai 0,00 persen atau tidak didukung dengan estimasi pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan Negara dan Hibah satker Biro Operasi Polda NTT adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya, yaitu Pendapatan Sewa Rumah Dinas bagi anggota POLRI/PNS yang tinggal di dalam asrama Polda NTT. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP mengalami penurunan sebesar 81,45 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP 2022.

Realisasi belanja pegawai Pada 31 Desember 2023 dan Pada 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.630.488.752,00 dan 6.639.013.722,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya penambahan atau mutasi masuk anggota POLRI dan PNS beserta Suami/Istri/Anak tidak sebanding dengan mutasi keluar. Realisasi belanja barang Pada 31 Desember 2023 dan Pada 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp12.515.491.000,00 dan Rp8.294.974.000,00. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,63 persen dari Realisasi pada Pada 31 Desember 2022.

2. Neraca

Akuntansi berbasis akrual tidak jauh berbeda dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, karena perlakuan akrual sudah banyak diakomodasi terutama dalam penyusunan neraca sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang SAP. Neraca di Kantor Biro Operasi Polda NTT menggambarkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Adanya pos piutang, aset tetap, dan hutang menunjukkan penerapan asas akrual dalam pembukuan. Dengan sistem akrual, entitas harus mengungkapkan aset dan kewajiban yang diharapkan akan terealisasi atau diselesaikan dalam 12 bulan ke depan. Struktur neraca di Biro Operasi Polda NTT meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.

Tabel 2. Neraca Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Perkiraan	Catatan	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Jumlah	%
ASET	C				
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-	-	0,00
Persediaan	C.1.3	1.623.613.430,00	146.280,00	1.623.467.150,00	1.109.835,35
Persediaan Belum Diregister	C.1.4	-	-	-	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	-	-	-	
JUMLAH ASET LANCAR		1.623.613.430,00	146.280,00	1.623.467.150,00	1.109.835,35
ASET TETAP	C.2				
Peralatan dan Mesin	C.2.1	3.846.823.717,00	3.843.222.509,00	3.601.208,00	0,09
Gedung dan Bangunan	C.2.2	-	-	-	0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.3	-	-	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	43.000,00	43.000,00	-	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(3.748.141.233,00)	(3.719.530.251,00)	(28.610.982,00)	0,77
Aset Tetap Yang Belum Diregister	C.2.6	-	-	-	0,00
JUMLAH ASET TETAP		98.725.484,00	123.735.258,00	(25.009.774,00)	-20,21
ASET LAINNYA	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	3.992.174,00	3.992.174,00	-	0,00
Aset Lain-lain	C.3.2	43.290.000,00	43.290.000,00	-	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(45.485.696,00)	(45.286.087,00)	(199.609,00)	0,44
JUMLAH ASET LAINNYA		1.796.478,00	1.996.087,00	(199.609,00)	-10,00
JUMLAH ASET		1.724.135.392,00	125.877.625,00	1.598.257.767,00	1.269,69
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	-	-	-	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-	-	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	-	-	0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-	-	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-	-	0,00
EKUITAS					
EKUITAS	C.5				
Ekuitas	C.5.1	1.724.135.392,00	125.877.625,00	1.598.257.767,00	1.269,69
JUMLAH EKUITAS		1.724.135.392,00	125.877.625,00	1.598.257.767,00	1.269,69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.724.135.392,00	125.877.625,00	1.598.257.767,00	1.269,69

Sumber: Laporan Keuangan Biro Operasi Polda NTT, 2024

Berdasarkan data diatas, per 31 Desember 2023, nilai Aset Lancar Biro Operasi Polda NTT mencapai Rp1.623.613.430,00, meningkat drastis dibandingkan tahun 2022 yang hanya Rp146.280,00. Aset Lancar ini adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan, dipakai, atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak pelaporan. Nilai Aset Tetap pada 2023 sebesar Rp98.725.484,00, menurun dari Rp123.735.258,00 pada 2022. Aset Tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Sementara itu, Aset Lainnya, yang meliputi aset tak berwujud, dana yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain, tercatat sebesar Rp1.796.478,00 pada 2023, sedikit menurun dari Rp1.996.087,00 pada 2022. Untuk kewajiban, semua jenis utang seperti utang kepada pihak ketiga, utang belum ditagih, uang muka dari KPPN, dan utang jangka pendek lainnya tercatat nihil pada kedua periode, menunjukkan tidak ada kewajiban yang harus segera diselesaikan. Utang jangka pendek lainnya ini umumnya berupa utang pajak bendahara yang belum disetor ke kas negara. Ekuitas atau kekayaan bersih entitas, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, meningkat signifikan dari Rp125.877.625,00 pada 2022 menjadi Rp1.724.135.392,00 pada 2023. Hal ini menunjukkan posisi keuangan entitas yang lebih kuat dan peningkatan kekayaan bersih selama periode tersebut.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi kegiatan keuangan Biro Operasi Polda NTT, termasuk pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional, dengan perbandingan terhadap periode sebelumnya. LO disusun berbasis akrual untuk melengkapi laporan keuangan lainnya seperti LPE dan Neraca, sehingga saling terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur LO mencakup: Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional, Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, serta Surplus/Defisit LO.

Tabel 3. Laporan Operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	
				Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					

PENDAPATAN		D.1			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	5.943.934,00	7.421.298,00	-1.477.364,00	(19,91)
Jumlah Pendapatan		5.943.934,00	7.421.298,00	-1.477.364,00	(19,91)
BEBAN		D.2			
Belanja Negara					
Beban Pegawai	D.2.1	6.630.488.752,00	6.636.743.722,00	-6.254.970,00	(0,09)
Beban Persediaan	D.2.2	376.161.789,00	336.430.206,00	39.731.583,00	11,81
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	11.112.696.000,00	7.945.406.000,00	3.167.290.000,00	39,86
Beban Pemeliharaan	D.2.4	851.425.000,00	186.828.000,00	664.597.000,00	355,73
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	472.210.000,00	83.580.000,00	388.630.000,00	464,98
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	28.360.439,00	582.238.043,00	-553.877.604,00	(95,13)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		19.471.341.980,00	15.771.225.971,00	3.700.116.009,00	23,46
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-19.465.398.046,00	-15.763.804.673,00	-3.701.593.373,00	23,48
KEGIATAN NON OPERASIONAL		D.3			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	35.135.584,00	-35.135.584,00	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	0,00	35.135.584,00	-35.135.584,00	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	35.135.584,00	-35.135.584,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-19.465.398.046,00	-15.728.669.089,00	-3.736.728.957,00	23,76
POS LUAR BIASA		D.4			
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		-19.465.398.046,00	-15.728.669.089,00	-3.736.728.957,00	23,76

Sumber: Laporan Keuangan Biro Operasi Polda NTT, 2024

Berdasarkan tabel, pendapatan Biro Operasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.943.934,00, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7.421.298,00. Dari sisi belanja, beban pegawai sebagai komponen terbesar mencapai Rp6.630.488.752,00 di tahun 2023, sedikit turun dibanding tahun 2022 sebesar Rp6.636.743.722,00, atau menurun sekitar 0,55%. Beban ini mencakup kompensasi dalam bentuk uang maupun barang kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai pemerintah non-PNS. Beban persediaan tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp376.161.789,00 dari Rp279.946.206,00 di tahun 2022, mencerminkan peningkatan konsumsi barang habis pakai. Sebaliknya, beban barang dan jasa melonjak dari Rp5.684.656.077,00 pada 2022 menjadi Rp11.112.696.000,00 pada 2023. Beban ini mencakup konsumsi barang/jasa untuk kegiatan operasional serta beban belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Selanjutnya, beban pemeliharaan meningkat tajam dari Rp162.978.000,00 menjadi Rp851.425.000,00, menunjukkan peningkatan biaya perawatan aset tetap. Hal serupa terjadi pada beban perjalanan dinas, yang melonjak sebesar 360,15% dari Rp53.013.000,00 pada 2022 menjadi Rp472.210.000,00 pada 2023. Beban ini mencerminkan aktivitas perjalanan dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sebaliknya, beban penyusutan dan amortisasi

turun drastis dari Rp466.245.333,00 pada 2022 menjadi hanya Rp28.360.439,00 di tahun 2023, atau menurun sebesar 93,91%. Beban ini mencerminkan alokasi sistematis atas nilai aset tetap dan aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Beban penyisihan piutang tak tertagih pada kedua tahun tercatat Rp0,00, meskipun disebutkan ada peningkatan estimasi ketidaktertagihan pada tahun 2023. Adapun pendapatan dan beban atas pelepasan aset non-lancar tidak tercatat pada kedua tahun. Pendapatan kegiatan non-operasional lainnya tercatat sebesar Rp35.135.584,00 hanya pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Beban kegiatan non-operasional lainnya serta surplus/defisit dari pos luar biasa juga tidak tercatat pada kedua tahun. Pos luar biasa ini mencakup transaksi yang jarang terjadi dan di luar kendali entitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan selanjutnya yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE merupakan komponen laporan di Kantor Biro Operasi Polda NTT yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPE menyajikan pos-pos sebagai berikut: Ekuitas Awal; Surplus/Defisit LO; Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar; Transaksi antar entitas; Kenaikan/penurunan ekuitas; dan Ekuitas Akhir (KMA No 15 Tahun 2015).

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	Catatan	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	
				Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	125.877.625,00	670.563.804,00	-544.686.179,00	-81,23
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	-19.465.398.046,00	-15.728.669.089,00	-3.736.728.957,00	23,76
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain	E.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	21.063.655.813,00	15.183.982.910,00	5.879.672.903,00	38,72
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	19.145.979.752,00	14.933.987.722,00	4.211.992.030,00	28,20
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	E.4.1	-5.943.934,00	-7.421.298,00	1.477.364,00	-19,91
Transfer Keluar	E.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk	E.4.2	1.923.619.995,00	257.416.486,00	1.666.203.509,00	647,28
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.598.257.767,00	-544.686.179,00	2.142.943.946,00	-393,43
EKUITAS AKHIR	E.5	1.724.135.392,00	125.877.625,00	1.598.257.767,00	1.269,69

Sumber: Laporan Keuangan Biro Operasi Polda NTT, 2024

Berdasarkan data per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, nilai ekuitas awal masing-masing sebesar Rp125.877.625,00 dan Rp670.563.804,00. Selama dua tahun berturut-turut, entitas mengalami defisit Laporan Operasional (LO) yang signifikan, yaitu sebesar minus Rp38.930.796.092,00 pada 2023 dan minus Rp31.527.609.346,00 pada 2022. Defisit LO ini merupakan akumulasi dari hasil kegiatan operasional, non-operasional, dan pos luar biasa. Tidak terdapat transaksi atau nilai terkait perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan mendasar, penyesuaian nilai aset, koreksi nilai persediaan, reklasifikasi aset, revaluasi aset, koreksi nilai aset tetap non-revaluasi, maupun koreksi lainnya. Semua item tersebut tercatat Rp0,00 pada kedua tahun, yang menunjukkan tidak ada pembetulan signifikan terhadap laporan keuangan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Nilai transaksi antar entitas meningkat dari Rp15.183.982.910,00 (2022) menjadi Rp21.063.655.813,00 (2023), mencerminkan peningkatan interaksi keuangan antar satuan kerja dalam lingkup internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, ataupun dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) tercatat sebesar minus Rp5.943.934,00, sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp19.145.979.752,00 pada tahun 2023, yang mencerminkan belanja dan pendapatan yang dikelola melalui kas negara. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat transfer masuk sebesar Rp1.923.619.995,00 dari satuan kerja internal, tanpa adanya transfer keluar. Monitoring dari aplikasi Monsakti menunjukkan tidak ada selisih atas transaksi transfer tersebut. Tidak terdapat pengembalian hibah langsung yang disahkan hingga akhir 2023. Akhirnya, nilai ekuitas akhir menunjukkan penurunan yang signifikan dari minus Rp15.673.062.632,00 pada 2022 menjadi minus Rp17.741.262.654,00 pada 2023. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang semakin memburuk, yang utamanya disebabkan oleh defisit operasional yang besar dan tidak adanya koreksi positif dari pos-pos lain.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memberikan informasi dalam Laporan Keuangan Kantor Biro Operasi Polda NTT dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian

yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

DISKUSI

Kantor Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, Operator Komitmen dan Pelaporan, Operator Aset dan Persediaan, serta Operator Perencanaan dan Penganggaran yang menyatakan bahwa sistem akuntansi berbasis akrual telah dijalankan secara konsisten. Penerapan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dapat dibandingkan antar periode, serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Implementasi akrual juga menjadi wujud keseriusan dalam mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel (Biro Operasi Polda NTT, 2024).

Salah satu indikator utama dari penerapan sistem ini adalah penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang telah menjadi alat bantu utama dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara terkomputerisasi. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses akuntansi, tetapi juga mendukung integrasi pengelolaan transaksi keuangan dan laporan yang dapat diakses secara transparan dan profesional. Penggunaan SAKTI memungkinkan penyusunan laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang datanya selanjutnya menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan satuan kerja.

Dari sisi kinerja keuangan, data menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNPB pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar 81,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja pegawai mengalami sedikit kenaikan yang disebabkan oleh penambahan personel POLRI dan PNS beserta keluarga. Realisasi belanja barang juga meningkat sebesar 9,63%. Di sisi lain, nilai aset lancar meningkat tajam dari Rp146.280,00 pada 2022 menjadi Rp1.623.613.430,00 pada 2023, sementara aset tetap mengalami penurunan. Tidak ditemukan kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan, dan nilai ekuitas meningkat dari Rp125.877.625,00 menjadi Rp1.724.135.392,00 dalam kurun waktu yang sama.

Laporan Operasional (LO) menunjukkan total pendapatan yang mengalami penurunan, sedangkan beban pegawai sedikit meningkat. Beberapa komponen beban lainnya, seperti beban barang dan jasa, beban perjalanan dinas, dan beban pemeliharaan, menunjukkan dinamika yang

cukup signifikan. Misalnya, beban perjalanan dinas melonjak hingga 360,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban penyusutan dan amortisasi menurun drastis sebesar 93,91%. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) juga mencerminkan fluktuasi nilai surplus/defisit operasional, transaksi antar entitas, serta nilai transfer masuk dan keluar yang semuanya menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang aktif dan dinamis. Penerapan sistem ini menggambarkan kemampuan Biro Operasi Polda NTT dalam menyajikan posisi keuangan yang jelas, termasuk informasi mengenai modal, pendapatan, dan aset yang dimiliki. Basis akrual memungkinkan identifikasi dan pengukuran kapasitas fiskal yang lebih akurat, sementara penyusunan anggaran tetap menggunakan basis kas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pengakuan kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE menggunakan basis akrual, sehingga memungkinkan penyajian yang lebih informatif dan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.

Dari perspektif teori, implementasi ini selaras dengan teori *stewardship* yang menekankan tanggung jawab manajemen (dalam hal ini adalah pimpinan Biro Operasi Polda NTT) untuk mengelola sumber daya publik dengan penuh integritas dan akuntabilitas kepada pemerintah sebagai *principal*. Dengan menerapkan SAP berbasis akrual, Biro Operasi Polda NTT menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh regulasi pemerintah pusat.

Penelitian ini juga memperkuat temuan dari penelitian terdahulu. Muniroh dan Rohman (2018) menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Jepara mulai menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015 sesuai PP No. 71 Tahun 2010, dengan tujuan menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dibandingkan antar periode. Penelitian oleh Satya (2020) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual meskipun terdapat tantangan terkait biaya dan sumber daya. Namun, berbeda dengan konteks daerah besar, Kantor Biro Operasi Polda NTT sebagai satuan kerja relatif kecil justru berhasil menerapkan SAP dengan baik berkat dukungan dari Kementerian Keuangan melalui pelatihan dan penyediaan aplikasi SAKTI, sehingga tidak terdapat kendala besar dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Biro Operasi Polda NTT, dapat diambil kesimpulan yaitu Pertama, Kantor Biro Operasi Polda NTT telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Kedua, Penerapan akuntansi berbasis akrual dibantu dengan

menggunakan aplikasi SAKTI pada Kantor Kantor Biro Operasi Polda NTT, yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang sudah diterapkan dengan basis akrual. Terakhir, Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang valid artinya datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi objek penelitian maupun penelitian selanjutnya. Bagi objek penelitian, khususnya Kantor Biro Operasi Polda NTT pada sub bagian keuangan, disarankan untuk melakukan akselerasi dalam penyebarluasan informasi terkait sistem informasi akuntansi berbasis akrual. Hal ini penting agar seluruh pegawai di sub bagian keuangan memiliki pemahaman dan kemampuan yang merata dalam menjalankan sistem atau aplikasi akuntansi berbasis akrual, tidak hanya terbatas pada satu atau dua orang saja. Selain itu, diperlukan pengembangan pemahaman atas setiap sistem yang digunakan melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan (diklat), maupun bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada sub bagian keuangan, tetapi juga melibatkan bagian lainnya yang berkaitan. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel baru seperti kualitas laporan keuangan atau tingkat kepuasan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kompleks dan mendetail terkait efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Alatas, A. (2023). Audit atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2022 oleh BPK: Temuan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan. *Urnal Audit Dan Pengawasan Keuangan Negara*, 8(1), 45–58.
- Amriana, R., & Iskandar, T. D. (2019). Implementasi Aplikasi SAKTI dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(2),

101–112.

- Biro Operasi Polda NTT. (2024). *Laporan Keuangan Biro Operasi Polda NTT Tahun Anggaran 2024*. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Indonesia, K. A. R. (2015). *Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengesahan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama*. Kementerian Agama RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications.
- Mukhtaromin. (2018). Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 45–53.
- Nasrudin, M., & Widagdo, W. (2020). Analisis Permasalahan Implementasi Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 55–67.
- Novelia. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem dan Layanan terhadap Kepuasan dan Kinerja Pengguna Aplikasi SAKTI. *Jurnal Sistem Informasi Dan Akuntansi Pemerintahan*, 12(1), 22–34.
- Permenkeu No. PMK- 159/PMK.05/2018 Pasal 1. (n.d.).
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. (n.d.).
- Satya, R. (2020). Implementasi SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. In *Repositori Universitas Negeri*. (Skripsi, U).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.